

## BAB 5

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dalam manajemen konflik antar ormas di Jakarta (2014—2017), maka dapat dibuat kesimpulan yang akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta adalah lembaga pemerintah daerah dengan peran strategis dalam pengelolaan, pembinaan, dan pemberdayaan ormas. Khususnya pada tataran pengelolaan dengan sasaran ormas mampu kuat dan kooperatif, sehingga membawa implikasi damai dan potensi konflik antar ormas dapat diminimalisasi. Adapun giat teknis implementasi pengelolaan ormas mengacu pada tugas pokok Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta yakni perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas-tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi pemantapan integrasi bangsa, pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia, pengembangan hubungan kelembagaan, dan kewaspadaan. Tugas pokok tersebut dijalankan melalui fungsi-fungsi rincian kegiatan. Sepanjang tahun 2014-2017, Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan tata kelola keberadaan ormas dan penanganan konflik antar ormas di Jakarta. Program peningkatan peran ormas, pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar (SKT), forum silaturahmi Forkopimda dengan ormas, serta *workshop* Pancasila menjadi program rutin Subbidang Ormas Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta menggarisbawahi ketaatan target ormas pada regulasi dan keaktifan. Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta *concern* pada asas ketaatan regulasi; upaya ormas-ormas agar dapat tertib terdaftar dan beriringan dalam pembangunan daerah. Sepanjang tahun 2014-2017, implementasi

program-program manajemen ormas bernuansa sosialisasi dan edukasi. Sedangkan konflik sosial antar ormas yang sebetulnya menjadi *impact* dari keberadaan ormas belakangan ini, belum menjadi *starting point* identifikasi dan perancangan giat teknis ormas. Dalam menjalankan tugas dan fungsi manajemen konflik antar ormas di Jakarta, Bakesbangpol berperan sebagai koordinator dengan elemen eksternal lain seperti unsur pemerintah terkait, misalnya para pimpinan daerah mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kotamadya. Selain itu, utamanya pada aspek pemantauan dan penegakan kondusifitas ibukota, koordinasi Bakesbangpol dilakukan bersama aparat Satpol PP, TNI, dan Polri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta telah melakukan koordinasi dengan segenap unsur pemerintah tersebut. Sebagai induk dari seluruh Kesbangpol lima kotamadya di DKI Jakarta, Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta menjalankan fungsinya untuk memimpin, mengarahkan, dan membina program serta aksi strategis pemberdayaan ormas pada Kesbangpol tingkat kota. Pada level preventif penanganan konflik antar ormas, Bakesbangpol mengembangkan sistem deteksi konflik melalui Subbidang Penanganan Konflik Sosial dan mengembangkan wewenang tersebut pada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

2. Faktor pendukung implementasi tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, utamanya terletak pada koordinasi yang selama ini telah berjalan baik dengan SKPD Forkopimda dan Kominda Jakarta. Sebab tugas pokok Bakesbangpol adalah sebagai koordinator yang tidak dapat bekerja sendirian dalam membina dan memantau pergerakan ormas. Oleh karenanya, koordinasi dengan Forkopimda dan Kominda yang sepanjang kurun waktu tahun 2014-2017 telah berjalan, adalah faktor pendukung dari implementasi tersebut. Faktor pendukung lain, yaitu landasan regulasi ormas yang kini semakin diperketat

melalui pengesahan UU 16 Tahun 2017 tentang ormas. Adapun secara khusus faktor pendukung yang menjadi kekhasan kinerja Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta adalah posisinya sebagai lembaga unsur pemerintah di daerah sentral Indonesia, dengan konsiderasi yang tinggi dan upah kesejahteraan pegawai yang juga tinggi. Ini memberi dampak positif yang signifikan dalam motivasi kerja para pegawai di Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan, faktor penghambat utamanya terletak pada tipologi kota Jakarta yang sangat dinamis sehingga perkembangan ormasnya juga dinamis, sistem sosial yang beragam secara demografis, dan memiliki ciri khas sebagai sorotan pusat pemerintahan. Sehingga kendala yang dihadapi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta pun menjadi lebih krusial. Lebih lanjut, faktor ketidakberdayaan ekonomi pada masyarakat *low class* di Jakarta mengakibatkan potensi-potensi konflik, termasuk konflik antar ormas, mudah pecah di level akar rumput. Faktor hambatan internal, yakni kapasitas Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta yang terbatas dengan beban kerja berlebih di Jakarta sebagai kota sentral Indonesia, termasuk dalam mengkoordinasi tugas, memantau, serta mencegah konflik antar ormas yang sedemikian dekat dengan keseharian masyarakat dan sering terulang. Faktor hambatan lain, yakni tidak serta-merta seluruh ormas di Jakarta dapat dibina lantaran kualitas hubungannya yang masih perlu ditingkatkan dengan pihak Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Teoretis**

Implementasi tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dalam manajemen konflik antar ormas di Jakarta idealnya direformulasi sejak tahap perancangan giat teknis tahunan. Konflik antar ormas di level akar rumput perlu menjadi *common ground* yang disadari, bahkan juga diintervensi. Mengingat konflik di level tersebut terus berulang dengan pola-pola yang

sama, dengan solidaritas ormas yang tinggi dan jika dibiarkan dapat mengarah pada tindak kekerasan yang lebih parah. Peneliti menyebut ini dalam konsep *shifting paradigm*, artinya bahwa untuk mendamaikan ormas, maka Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta tidak cukup dengan mengadakan program sosialisasi, edukasi, dan silaturahmi konvensional seperti yang biasa dilakukan. Perlu ada paradigma baru di Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta yang bersifat rekonsiliatif dan inovatif baik substansi konten maupun penyajian konten, sehingga nantinya program-program pemberdayaan ormas tersebut memiliki parameter dan membawa dampak positif bagi transformasi hubungan antar ormas, khususnya di level akar rumput. Aspek formal dan kepatuhan regulasi tentu menjadi sasaran utama dari pemantauan keberadaan ormas, namun yang juga menjadi penting sesuai dinamika lapangan adalah bagaimana seluruh ormas tersebut mampu direkognisi dan dikelola dengan baik oleh Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, sang aktor berwenang dalam manajemen konflik antar ormas di Jakarta.

### **5.2.2 Saran Praktis**

Peneliti memberikan tiga skema rekomendasi manajemen konflik pada tataran *highlight prevention stage*. Skema-skema ini dapat diimplementasikan oleh Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, dan merupakan skema lanjutan dari pola koordinasi Bakesbangpol yang selama ini sudah berjalan khususnya dalam kurun waktu tahun 2014-2017. Skema pertama yakni skema berbasis intervensi pemerintah daerah dengan sasaran *grass root levels* masyarakat rawan konflik antar ormas, skema kedua yakni pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) tingkat provinsi yang khusus memantau dan menangani ormas di Jakarta, berisikan sejumlah elemen SKPD dan aparat keamanan di Jakarta, dan skema ketiga yakni skema FGD (*Focus Group Discussion*) elitis antar ormas besar di Jakarta dengan tema-tema ideologis dan diadakan 12 kali dalam setahun.